

JAWARA DALAM PERUBAHAN SOSIAL DI MASYARAKAT BANTEN

Athoullah¹

Email: athoullah@gmail.com

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ABSTRAK

Jawara merupakan bagian dari struktur sosial yang ada di masyarakat Banten yang selalu mengabdikan pada masyarakat Banten, karena dibangun untuk membela akan nilai kebenaran dan keadilan, karena dalam struktur sosial yang ada di masyarakat Banten sebelum di obrok-abrik oleh penjajah adalah: (1). Ulama yang mempunyai peran menjaga kewibawaan Agama (Islam) dan menjadi rujukan bagi semua masyarakat di dalam mengisi tataran kehidupannya, (2). Umaro yang mempunyai peran untuk menjalankan pemerintahan Banten termasuk di dalamnya adalah Sulthan, para santri/golongan terdidik yang kalau di manifestasikan pada saat sekarang ini adalah masyarakat terpelajar, abdi Negara dan sebagainya, (3). Jawara masyarakat Banten yang pernah nyantri pada Ulama dan mempunyai kelebihan (supernatural/metafisika) yang akan mengayomi masyarakat lemah dan membela kepentingan agama dan keadilan masyarakat Banten. Namun, struktur sosial tersebut berubah setelah alih kepemimpinan (masa penjajahan) dari kesulthanan ke kolonial Belanda. Bangsa Belanda mengubah sekenanya struktur sosial dari Ulama-Umaro-Jawara yang menjadi Jawara-Umaro-Ulama akibat politik etisnya yang diterapkan pada warga Pribumi yang mendarah daging sampai sekarang.

Pada saat sekarang ini Jawara berjuang untuk negara dengan doktrin "**bela diri, bela Bangsa, bela Negara**", perilaku politik mereka tidak lepas dari kepentingan ekonomi. Ini terlihat dari makna bela diri yang difahami sebagai "jihad untuk mengejar kepentingan materi". Dengan demikian nilai (value) yang mereka kejar sebenarnya adalah kepentingan ekonomi. Untuk kepentingan ekonomi itu, mereka berusaha mempertahankan legitimasi kepemimpinan mereka yang diperoleh dari budaya lokal. Karena sumber legitimasi kepemimpinannya berasal dari budaya lokal, maka tipe kepemimpinan mereka bisa digolongkan kepada tipe otoritas tradisional. Adanya otoritas tradisionalnya itu menjadi semakin kuat karena mereka mampu menguasai lembaga-lembaga strategis di bidang ekonomi dan politik, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah, Kadin Daerah dan lain sebagainya (ekonomi) dan wakil gubernur, walikota, lurah (politik), serta beberapa organisasi kepentingan lainnya. Dengan penguasaan tersebut perilaku politik jawara akhirnya mendapat legitimasi struktural.

Keyword: Jawara, Kekuasaan dan Perubahan Sosial.

Pendahuluan

Pada tanggal 4 Oktober 2000 merupakan momentum yang sangat bersejarah bagi masyarakat Banten pada khususnya karena pada tanggal itu Banten secara resmi menjadi Propinsi yang ke-30 di Republik ini, dan terlepas dari Propinsi Jawa Barat sebagai propinsi Induk yang dulunya masih jadi kresidenan Banten.

Pada hakikatnya perjuangan masyarakat banten ingin lepas dari Jawa Barat di mulai dari tahun 1962, Microb (1998) mengatakan bahwa perjuangan masyarakat Banten pada waktu itu mempunyai beberapa kendala yang salah satunya adalah permasalahan politik Indonesia yang tidak memungkinkan banten lepas dari Jawa Barat.

Banten kini sudah menjadi propinsi sehingga banyak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan sosial terutama dalam pembangunan propinsi banten. Banten Untuk kepentingan pembangunan propinsi terutama peningkatan ekonomi melalui PAD, Banten yang terkenal akan relegius, dan mempunyai sifat kejawaraan atau kebantenan di dalam menjalankan pemerintahan diperoleh dari budaya lokal. Karena sumber legitimasi kepemimpinannya berasal dari budaya lokal, maka tipe kepemimpinan banten saat ini bisa digolongkan kepada tipe otoritas tradisional.

Pembangunan propinsi Banten saat ini tidak terlepas dari lapisan sosial yang ada yaitu Ulama (kyai) serta jawara Banten. Jawara banten yang selalu menjadi sorotan yang sangat banyak dewasa ini karena sangat dominannya peranan Jawara tersebut.

Para Jawara dalam membangun hubungan antar mereka dan dengan pihak lain membangun jaringan yang khas. Salah satu yang khas dari kehidupan antar mereka adalah rasa solidaritas yang tinggi. Apalagi kalau yang menghadapi masalah tersebut adalah orang yang memiliki hubungan emosional, seperti adanya hubungan kekerabatan, seguru-seelmu, pertemanan dan sebagainya.

Jaringan yang dibentuk oleh para jawara tersebut kini tidak hanya bersifat non-formal atau tradisional tetapi juga kini memiliki organisasi masa yang tersendiri, yakni dengan terbentuknya P3SBBI (Persatuan Pendekar Pesilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia). Organisasi para pendekar ini kini menghimpun lebih dari 100 perguruan yang tersebar di 17 propinsi di

Indonesia. Orginsasi ini berpusat di Serang, Ibu Kota Propinsi Banten, yang kini masih dipimpin oleh H. Tb. Chasan Sochib.

Otoritas tradisionalnya itu menjadi semakin kuat karena mereka mampu menguasai lembaga-lembaga strategis di bidang ekonomi dan politik, seperti Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah, Kadin Daerah dan lain sebagainya (ekonomi) dan wakil gubernur, walikota, lurah (politik), serta beberapa organisasi kepentingan lainnya. Dengan penguasaan tersebut perilaku politik jawara akhirnya mendapat legitimasi struktural.

Sementara itu, mereka pun kuat secara internal karena mendapatkan dukungan dari anak buahnya yang mudah dimobilisasi. Pola hubungan mereka yang bersifat patrimonial menjadikan anak buah terikat dengan pemimpin jawara.

Jawara pun berusaha menjalin hubungan baik dengan elit-elit lain, seperti birokrat, partai dan militer. Hubungan ini bersifat simbiosis yang sangat menekankan keuntungan bagi masing-masing pihak. Mereka menyebut elit-elit tersebut sebagai "mitra".

Dengan budaya politik, otoritas tradisional, penguasaan pada lembaga-lembaga strategis, legitimasi struktural, patrimonialisme pemimpin, dan hubungan simbiosis dengan elit lain, kekuasaan jawara adalah sangat kuat untuk konteks politik lokal. Dengan kekuasaannya itu, mereka berusaha mengontrol terhadap lembaga-lembaga yang dikuasainya, terhadap lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bersebrangan dengannya dan terhadap kelompok-kelompok kritis.

Kekuasaan yang dipegang oleh segelintir jawara dengan jaminan kekuatan fisik (magi dan persilatan) dan kemampuan ekonomi, mereka sebenarnya menerapkan sistem pemerintahan oligarki. Sistem ini semakin tumbuh subur karena selain mendapat dukungan dari mitra-mitranya juga karena pola interaksi yang mereka kembangkan adalah model *patrimonial* dimana ketua jawara diakui sebagai patronnya. Dengan model ini, upaya control (pengawasan) terhadap lembaga-lembaga bersebrangan dan kelompok-kelompok kritis menjadi sangat efektif karena para jawara, dengan partisipasi bentuk kaula-partisipan, mudah untuk memobilisasi massa yang mereka miliki.

Dengan sistem pemerintahan yang menganut sistem oligarki dan kondisi Banten yang demikian, maka perkembangan demokrasi dan civil society di Banten menjadi persoalan yang sangat serius. Pada tingkat tertentu, proses yang berlangsung malah terjadinya decivilisasi yang membuat masyarakat Banten tidak berdaya, tidak mandiri, lak tercerahkan, dan dikuasai oleh ketakutan menyuarkan hak individunya. Dari uraian di atas penulis akan membahas beberapa permasalahan yang akan di angkat yang di antaranya adalah Bagaimana peranan jawara dalam sosial politik di Banten? Serta persepsi masyarakat Banten terhadap Jawara?

Tujuan

Tujuan dari jurnal ini adalah pertama, mengetahui tentang peranan jawara dalam politik di Banten, serta keterlibatannya di dalam pemerintah, kedua sejauhmana perubahan yang di bawa akibat intervensi Jawara dalam berbagai hal di tataran pemerintahan di Banten.

KERANGKA TEORITIS

Sumber-Sumber Struktural

Dalam perubahan sosial yang ada di Propinsi Banten yang sangat kentara (dominan) peranannya adalah jawara Banten sehingga yang sampai masuk dalam ranah pemerintahan di propinsi Banten itu sendiri. Hal ini yang menjadi unik untuk di kaji selanjutnya maka penulis dalam membahas permasalahan banten dalam konteks perubahan sosial ini menggunakan pisau analisa structural fungsional dan teori konflik sosial.

Sumber-sumber struktural memandang bahwa determinan dari perubahan sosial ditentukan oleh struktur-struktur yang ada dalam suatu masyarakat. Struktur tersebut bisa berupa pemerintah, sekelompok orang yang mempunyai masalah sehubungan dengan status, sekelompok elit, pemuda dan lain sebagainya. Sebagai contoh, pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam suatu masyarakat dapat dianggap sebagai pendorong atau perintang perubahan (Lauer, 2003; 414).

Menurut kelompok Marxian, posisi negara adalah organisasi reaksioner yang melayani kepentingan kelas orang kaya, dan karena itu menentang perubahan. Sehingga kehadiran pemerintah menimbulkan keraguan apakah hadirnya pemerintah akan mampu membantu kelompok-kelompok yang termarginalkan secara efektif ataukah tidak sama sekali. Dalam konteks ini, kewajiban bagi kaum yang termarginalkan untuk bergerak lewat revolusi guna mengambil alih tampuk kekuasaan dari kelompok kaum modal. Strategi revolusi kemudian mengambil 2 tahap yakni, revolusi borjuis (transisi feodal ke kapitalisme) dan revolusi proletariat (transformasi dari kapitalisme ke komunisme) melalui partai pekerja (komunis).

Seperti telah disebutkan, sekelompok elit mempunyai peran penting dalam perubahan sosial. Meski kategori elit sangat beragam¹, akan tetapi terdapat kecenderungan umum dari kelompok ini yakni jumlahnya yang minoritas. Dalam hal ini, Toynbee dalam Lauer (2003) mengatakan bahwa perkembangan peradaban berkaitan erat dengan karya kreatif kelompok minoritas yang harus memikirkan tanggapan yang tepat atas tantangan sosial dan juga yang mendorong masyarakat memilih alternatif tanggapan yang direncanakannya. Bila elit tidak lagi dapat memenuhi fungsi ini, maka peradaban akan mengalami kemunduran dan selanjutnya kematian. Pendapat Toynbee tersebut memperlihatkan dua hal yang penting kepada kita, yakni bahwa kehadiran elit dapat mempercepat sekaligus memperlambat perubahan. Ini dibuktikan dengan studi Martindale yang menunjukkan bahwa elit intelektual telah menjadi sumber penting yang mendorong ke arah perubahan

Akses Terhadap Pembangunan : Pendekatan Aktor

Definisi akses yang digunakan dalam makalah ini merujuk pada Peluso (2003:1) yang mengartikan akses sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu. Definisi ini lebih luas dari pengertian klasik tentang properti, yang didefinisikan sebagai – hak untuk memperoleh manfaat dari sesuatu (*“the right to benefit from things”*). Akses dalam definisi Peluso

¹ Karl Mannheim membagi kategori elit menjadi 6 bagian, yaitu: elit politik, elit organisator, intelektual, seniman, moralis dan elit agama.

mengandung makna “sekumpulan kekuasaan” (“*a bundle of powers*”) berbeda dengan properti yang memandang akses sebagai “sekumpulan hak” (“*a bundle of rights*”). Sehingga relasi properti utamanya yang berkenaan dengan klaim atas hak, maka untuk memperoleh manfaat dari Pembangunan termasuk dalam hal ini, namun tidak terbatas pada, relasi properti.

Kekuasaan, menurut Peluso, terdiri atas elemen-elemen material, budaya dan ekonomi-politik yang berhimpun sedemikian rupa membentuk “bundel kekuasaan” (*bundle of powers*) dan “jaring kekuasaan” (*web of powers*) yang kemudian menjadi penentu akses ke sumber daya. Implikasi dari definisi Peluso ini adalah bahwa kekuasaan yang inheren terkandung di dalam dan dipertukarkan melalui berbagai mekanisme, proses dan relasi sosial akan mempengaruhi kemampuan seseorang atau institusi untuk memperoleh manfaat dari pembangunan. Mengingat elemen-elemen material, budaya, ekonomi dan politik tidak statis, maka kekuasaan dan akses yang terbentuk dalam pembangunan juga berubah-ubah menurut ruang dan waktu. Dengan kata lain individu dan institusi mempunyai posisi yang berbeda-beda dalam relasinya dengan pembangunan pada ruang dan waktu yang berbeda (Peluso 2003).

Pendekatan dengan Teori konflik

Lahirnya teori konflik terinspirasi dari teoretisi neo-marxis, pergulatan antar kelas ekonomi. Sosiolog Jerman, Ralf Dahrendorf, menerangkan konflik kelas dalam masyarakat industrial pada tahun 1959. Teori ini sangat berbeda dari teori Marx karena ia menganalisis konflik tanpa memperhitungkan politik ekonomi yang ada (apakah kapitalisme atau sosialisme). Jika Marx bersandar pada pemilikan alat produksi, maka Dahrendorf bersandar pada control atas alat produksi. Dalam terminologi Dahrendorf, pada masa pos-kapitalisme, kepemilikan akan alat produksi (baik sosialis atau kapitalis) tidak menjamin adanya kontrol atas alat produksi. Jadi, di luar Marxisme, ia mengembangkan beberapa terminologi dari Max Weber, antara lain bahwa sistem sosial itu dikoordinasi secara imperatif melalui otoritas/kekuasaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori Dahrendorf melakukan kombinasi antara fungsionalisme (tentang struktur dan fungsi masyarakat) dengan teori (konflik) antar kelas sosial.

Teori sosial Dahrendorf berfokus pada kelompok kepentingan konflik yang berkenaan dengan kepemimpinan, ideologi, dan komunikasi di samping tentu saja berusaha melakukan berbagai usaha untuk menstrukturkan konflik itu sendiri, mulai dari proses terjadinya hingga intensitasnya dan kaitannya dengan kekerasan. Jadi bedanya dengan fungsionalisme jelas, bahwa ia tidak memandang masyarakat sebagai sebuah hal yang tetap/statis, namun senantiasa berubah oleh terjadinya konflik dalam masyarakat. Dalam menelaah konflik antara kelas bawah dan kelas atas misalnya, Dahrendorf menunjukkan bahwa kepentingan kelas bawah menantang legitimasi struktur otoritas yang ada. Kepentingan antara dua kelas yang berlawanan ditentukan oleh sifat struktur otoritas dan bukan oleh orientasi individu pribadi yang terlibat di dalamnya. Individu tidak harus sadar akan kelasnya untuk kemudian menantang kelas sosial lainnya.

Menurut Georg Simmel (1858–1918), sosiolog fungsionalis Jerman juga telah mencoba mendekati teori konflik dengan menunjukkan bahwa konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang mendasar; berkaitan dengan sikap bekerja sama dalam masyarakat. Dalam hal ini Simmel mungkin salah seorang sosiolog pertama yang berusaha keras untuk mengkonstruksi sistem formal dalam sosiologi yang diabstraksikan dari sejarah dan detail pengalaman manusia. Analisisnya tentang efek ekonomi uang dalam perilaku manusia merupakan salah satu pekerjaannya yang penting.

Bertitik berat pada konsekuensi-konsekuensi terjadinya konflik pada sebuah sistem sosial secara keseluruhan. Teorinya menunjukkan kekeliruan jika memandang konflik sebagai hal yang selalu merusak sistem sosial, karena konflik juga dapat memberikan keuntungan pada masyarakat luas di mana konflik tersebut terjadi. Konflik justru dapat membuka peluang integrasi antar kelompok. Lewis Coser (2003).

PEMBAHASAN

Perubahan Sosial di Propinsi Banten Prespektif peran Jawara dalam Politik

Asal-usul kata “jawara” pun tidak begitu jelas. Sebagian orang berpendapat bahwa jawara berarti juara, yang berarti pemenang, yang ingin dipandang orang yang paling hebat. Memang

bahwa salah satu sifat jawara adalah selalu ingin menang, yang terkadang dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan cara yang tidak baik. Sehingga seorang jawara itu biasa bersifat *sompral* (berbicara dengan bahasa yang kasar dan terkesan sombong), sebagian orang lagi berpendapat bahwa kata “jawara” berasal dari kata “jaro” yang berarti seorang pemimpin yang biasanya merujuk kepada kepemimpinan di desa, yang kalau sekarang lebih dikenal dengan kepala desa atau lurah. Pada masa dahulu kepala desa atau lurah di Banten itu mayoritas adalah para jawara. Para jawara tersebut memimpin *kajaroan* (desa) namun kemudian terjadi pergeseran makna sehingga jawara dan jaro menunjukkan makna yang berbeda. Sekarang ini jawara tidak mesti menjadi pemimpin, apalagi menjadi kepala desa atau lurah.

Menurut Tihami (2003), bahwa jawara itu adalah murid kiyai. Kiyai di Banten pada tempo dulu tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam tetapi mengajarkan ilmu persilatan atau *kanuragan*. Hal ini disebabkan pesantren, pada masa yang lalu, berada di daerah-daerah terpencil dan kurang aman, karena kesultanan tidak mampu menjangkau daerah-daerah yang terpencil yang sangat jauh dari pusat kekuasaan. Murid kiyai yang lebih berbakat dalam bidang intelektual, mendalami ilmu-ilmu agama Islam pada akhirnya disebut santri. Sedangkan murid kiyai yang memiliki bakat dalam bidang fisik lebih condong kepada persilatan atau ilmu-ilmu *kanuragan*, yang kemudian disebut jawara. Karena itu dalam tradisi kejawaran bahwa seorang jawara yang melawan perintah kiyai itu akan *kawat*. Mungkin atas dasar itu seorang pengurus persilatan dan seni budaya Banten menyatakan bahwa jawara itu adalah *khodim* (pembantu) nya kiyai. Bahkan seperti yang diungkapkan salah seorang kiyai di Serang. *juwara iku tentarane kiyai* (jawara itu tentaranya kiyai).

Istilah jawara dalam percakapan sehari-hari masyarakat Banten sekarang ini dipergunakan untuk istilah denotatif dan juga referensi untuk mengidentifikasi seseorang. Istilah jawara yang menunjukkan referensi untuk identifikasi seseorang adalah gelar bagi orang-orang yang memiliki kekuatan fisik dalam bersilat dan mempunyai ilmu-ilmu kesaktian (*kadigjayaan*), seperti kekebalan tubuh dari senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh dan sebagainya, sehingga membangkitkan perasaan orang lain penuh dengan pertentangan: hormat dan takut, rasa kagum dan benci. Sedangkan istilah jawara yang

bersifat denotatif berisi tentang sifat yang merendahkan derajat (derogatif) yang biasanya digunakan untuk orang-orang yang berperilaku sombong, kurang taat menjalankan perintah agama Islam atau melakukan sesuatu dengan cara-cara yang tidak baik terhadap orang untuk kepentingan dirinya semata, seperti melakukan ancaman, kekerasan dan kenekadan. Karena itu kesan orang terhadap istilah jawara cenderung negatif dan derogatif. Maka ada orang yang mendefinisikan jawara dengan “*jago wadon lan lahur*” (tukang main perempuan dan tukang bohong), “*jago wadon lan harta*” (tukang main perempuan dan tamak harta). Kesan yang kurang baik tentang jawara tersebut yang kemudian bagi orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu kadigjayaan atau persilatan yang sudah “terpelajar” tidak mau menamakan dirinya jawara tetapi lebih senang disebut pendekar.

Persepsi masyarakat tentang jawara saat ini yang kurang simpatik dan cenderung negatif sebenarnya bisa diterangkan dengan teori “bandit sosial” di atas. Peranan jawara pada masa lalu yang menonjolkan keberanian untuk melawan musuh bersama masyarakat yakni: pemerintah kolonial Belanda, mendapat penghargaan dan penghormatan di mata rakyat Banten. Karena itu jawara dianggap pahlawan oleh rakyat, sebagai pembela dan pelindung atas kepentingannya. Peran-peran itu yang telah ditampilkan secara baik oleh Mas Jakaria serta tokoh-tokoh jawara masa silam. Namun setelah Indonesia bebas dari kolonialisme, musuh bersama rakyat itu tidak ada. Namun perilaku-prilaku jawara, seperti *sompral*, sombong, kurang taat dalam beragama, justru tidak berubah, sehingga menimbulkan antipati masyarakat terhadap jawara.

Tokoh-tokoh agama, kiyai, terutama dari pemimpin tarekat, selain dipandang sebagai orang yang mengerti tentang pesan-pesan dan ajaran-ajaran agama juga dipandang sebagai sosok yang paling dekat dengan pusat kekuatan supernatural, karena itu dipercayai memiliki kekuatan magis dan mistis, yang lebih dikenal dengan ilmu-ilmu *hikmah*. Karena kharisma seseorang kiyai akan semakin besar apabila ia selain memiliki kemampuan untuk memahami ajaran-ajaran agama, terutama *kitab-kitab kuning* juga dipercayai oleh masyarakat memiliki kekuatan mistis dan magis yang besar pula, sehingga ia dianggap bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang biasa. Tokoh lain di wilayah Banten yang memiliki

status sosial yang dihormati dan disegani karena dianggap memiliki kemampuan untuk memanipulasi kekuatan supra-natural yang berupa magis dan mistis adalah jawara. Jawara dianggap memiliki ilmu-ilmu *kadigjayaan* (kesaktian) dan menguasai ilmu persilatan. Selain itu jawara juga harus memiliki keberanian (*wanten, kawani*) secara fisik, yang keberaniannya itu didukung oleh kemampuan dirinya dalam menguasai ilmu bela diri (persilatan) dan ilmu-ilmu kesaktian. Karena itu seseorang yang hanya memiliki ilmu-ilmu *kadigjayaan* dan persilatan tidak akan dinamakan jawara apabila ia tidak memiliki keberanian. Karena kelebihanannya yang dimilikinya itu maka kiyai dan jawara dipandang sebagai pemimpin masyarakat dan merupakan “elit sosial” di masyarakat Banten. Kedua tokoh tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat dan juga memiliki para pengikut yang setia. Kepemimpinannya bersifat kharismatik, yakni: kepemimpinan yang bertumpu kepada daya tarik pribadi yang melekat pada diri pribadi seorang kiyai atau jawara tersebut. Karena posisinya yang demikian itu maka seorang kiyai atau jawara dapat selalu dibedakan dari orang kebanyakan. Juga karena keunggulan kepribadiannya itu, ia dianggap bahkan diyakini memiliki kekuatan supernatural sehingga memiliki kemampuan luar biasa dan mengesankan di hadapan khalayak banyak.

Menurut masyarakat Banten gelar Kiyai diberikan kepada seorang yang “terpelajar” dalam pemahaman keislamannya dan ia membaktikan hidupnya “demi mencari ridha Allah” untuk menyebarluaskan serta memperdalam ajaran-ajaran agama Islam kepada seluruh masyarakat melalui lembaga pendidikan ataupun pesantren, yang menyandang gelar tersebut biasanya memiliki kesaktian dan ahli kebatinan, ahli hikmah, guru dan pemimpin masyarakat yang berwibawa yang memiliki legitimasi berdasarkan kepercayaan masyarakat. Sedangkan jawara dalam pandangan masyarakat Banten merujuk kepada seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan fisik dalam bersilat (*kanuragan*) dan mempunyai ilmu-ilmu kesaktian (*kadigjayaan*), seperti kekebalan tubuh dari senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh dan sebagainya, sehingga membangkitkan perasaan hormat dan takut, rasa kagum dan benci. Berkat kelebihanannya itu, ia bisa muncul menjadi tokoh yang kharismatik, terutama pada saat-saat kehidupan sosial mengalami krisis.

Kiyai dalam masyarakat Banten merupakan tokoh panutan masyarakat yang dihormati berkat perannya dalam mengarahkan dan menata kehidupan bermasyarakat. Sedangkan jawara berkedudukan sebagai pemimpin dari lembaga adat masyarakat diapun tokoh yang dihormati apabila ia menjadi pemimpin atau penguasa. Keduanya merupakan pemimpinan yang meemiliki pengaruh pada masyarakat Banten, kebesaran namanya sangat ditentukan oleh nilai-nilai pribadi yang dimiliki, kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan (agama dan sekuler), kesaktian dan keturunannya. Peranan kiyai dalam masyarakat Banten adalah sebagai tokoh masyarakat (*kokolot*), guru ngaji, guru kitab, guru tarekat, guru ilmu “hikmah” (ilmu ghaib) dan sebagai mubaligh. Peranan seorang kiyai selain sebagai pewaris tradisi keagamaan juga pemberi arahan atau tujuan kehidupan masyarakat yang mesti ditempuh. Karena itu ia lebih bersifat memberikan pencerahan terhadap masyarakat, semua itu menjadi masyarakat Banten yang madani dan memiliki religiusitas yang tinggi, peran-peran seperti itu sangat diperlukan, apalagi bagi masyarakat yang masih mencari jati dirinya. Sedangkan jawara lebih cenderung kepada kekuatan fisik dan “batin”. Sehingga dalam masyarakat Banten peran-peran yang sering dimainkan oleh para jawara adalah menjadi jaro (kepala desa atau lurah), guru ilmu silat dan ilmu “batin” atau magi, satuan-satuan pengamanan. Peranan tersebut bagi masyarakat sangat membantu apalagi saat Banten dalam kekacauan dan kerusuhan yang cukup lama, namun demikian peranan para jawara dalam sosial, ekonomi dan politik dalam kehidupan masyarakat Banten saat ini sangat diperlukan. Tetapi akhir-akhir ini peranan para jawara mulai berbeda dibandingkan dengan peranan jawara pada masa-masa lalu dalam sejarah kehidupan masyarakat Banten sesuai perkembangan zaman.

Begitu pula ketika mereka membina hubungannya dengan sesama Kiyai dan jawara disatukan dalam ruang lingkup kebudayaan Banten. Sifat hubungan keduanya tidak hanya bersifat simbiosis, yakni saling ketergantungan tetapi juga kontradiktif. Jawara membutuhkan *elmu* dari kiyai, sedangkan sebaliknya kiyai, atas jasanya tersebut, menerima uang *shalawat* (bantuan material) dari jawara. Tetapi juga banyak kiyai yang tidak senang terhadap berbagai perilaku jawara yang sering menghalalkan segala cara

walaupun dengan cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Struktur yang ada di masyarakat yang berupa sekelompok Jawara Banten yang membentuk dirinya sangat mumpuni di dalam merubah tatanan kehidupan yang ada di Propinsi Banten, sehingga mereka membuat organisasi dengan merubah nama Jawara menjadi Pendekar². Yang tokohnya adalah Bapak H. Tb. Hasan Sochab³.

Setelah di laksanakan pemilihan Kepala daerah Propinsi Banten (pemilihan gubernur), para calon pemimpin pertama yang akan menduduki orang nomor satu di Propinsi Banten di perebutkan beberapa kandidat⁴ dan putri sulung dari abah (panggilan dari H. Tb. Hasan Sochib) ikut serta dalam kompetisi ini. Dan dapat di pastikan oleh masyarakat Banten pada umumnya siapa yang akan menjadi pemenang. Adalah putri sulung dari abah yang menjadi pemenang pilkada pertama di Propinsi Banten ini. Perspektif ini bersumber pada sekelompok elit mempunyai peran penting dalam perubahan sosial. Meski kategori elit sangat beragam, akan tetapi terdapat kecenderungan umum dari kelompok ini yakni jumlahnya yang minoritas. Dalam hal ini, Toynbee dalam Lauer (2003) mengatakan bahwa perkembangan peradaban berkaitan erat dengan karya kreatif kelompok minoritas yang harus memikirkan tanggapan yang tepat atas tantangan sosial dan juga yang mendorong masyarakat memilih alternatif tanggapan yang direncanakannya.

Kelompok minoritas ini yang di pimpin oleh H. Tb. Hassan Sachib dengan para jawaranya karena telah membuat organisasi, akhirnya di kuasai, dan para jawara memasuki ranah pemerintahan dari berbagai lini, untuk mengambil keuntungan dari pembangunan yang di jalankan oleh pemerintahan propinsi Banten.

Masuknya pendekar menjadi bagian struktural di propinsi banten karena mempunyai kreatifitas untuk menguasai segala kekayaan dari Banten, dan menjadi mayoritas di dalam, sehingga masyarakat banten mulai tidak menyukai dari peranan para jawara/pendekar yang sudah kehilangan fungsinya terdahulu selalu

memikirkan kepentingan masyarakat dan meminta nasihat dari kiyai, dan kini sudah berubah.

Pendekatan Aktor.

Peranan dari pendekar pimpinan H. Tb. Hassan Sichab di propinsi banten yang mayoritas merambah cakupannya hingga ke kabupaten/kota yang ada di propinsi Banten dan menjadi raja jelmaan untuk memperkaya segelintir orang dari pembangunan yang ada di Banten.

Relasi sosial yang sudah terbangun oleh H. Tb. Hassan Sohib sehingga ke dalam pemerintahan banten. Menurut Peluso (2003) bahwa individu dan institusi mempunyai posisi yang berbeda-beda dalam relasinya dengan pembangunan pada ruang dan waktu yang berbeda serta perananan individu mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Peranan H. Hassan di wilayah pemerintahan walau secara tidak langsung masuk dalam struktur, kecuali anaknya yang menjadi gubernur, dan beberapa kabupaten/kota yang sudah di kuasai.

Pengaruhnya yang sangat luas tersebut membentuk bundel Kekuasaan dalam ekonomi-politik serta jaringan kekuasaan yang kuat, untuk memperkokoh dari cangkramnya. Sehingga membentuk tirani kecil yang ada di wilayah dan masyarakat menyebut H. Hasan sebagai Gubernur Jenderal serta tidak simpatik lagi akan peranannya di Banten.

Gerakan Masyarakat Banten

Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Banten terkait dengan pengaruh yang dibangun oleh gerakan sosial atau *social movement*. Gerakan sosial tersebut dilakukan oleh kelompok atau organisasi masyarakat yang kurang respek terhadap pemerintahan yang di nilai oleh beberapa kalangan pada saat ini kurang memperhatikan masyarakatnya Banten. Gerakan sosial yang dilakukan merupakan kekuatan yang melekat dengan sifat emosional dan konflik yang mempunyai sebab-sebab sehingga terjadinya gerakan. Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa gerakan sosial berbentuk representasi perubahan dari bawah dengan pengorganisasian masanya

² Nama pendekar sangat asing di telinga masyarakat Banten pada umumnya, karena nama pendekar hanya ada di Jawa Timur.

³ Tokoh yang di segani di masyarakat Banten, karena berhasil menghimpun para Jawara Banten

untuk di satukan dalam satu wadah organisasi Pendekar Banten Indonesia

⁴ Kebanyakan para kandidat adalah mantan pendiri propinsi Banten.

serta respon stimulan dari bentuk sosial dan elit politik

Dalam sosiologi, teori konflik berdasar pada asumsi dasar bahwa masyarakat atau organisasi berfungsi, di mana individu dan kelompoknya berjuang untuk memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya; secara tak langsung dan tak mungkin dihindari adalah perubahan sosial yang besar seperti revolusi dan perubahan tatanan politik. Teori konflik ini secara umum berusaha memberikan kritiknya pada fungsionalisme yang meyakini bahwa masyarakat dan organisasi memainkan peran masing-masing sedemikian seperti halnya organ-organ dalam tubuh makhluk hidup.

Intinya adalah bahwa ada empat hal yang penting dalam memahami konflik sosial yang ada di Masyarakat Banten saat ini, antara lain: *pertama* kompetisi untuk mendapatkan sumber daya yang ada di Banten, yang ketika pembagian kue kekuasaan di nilai kurang adil⁵. Yang menjadi dasar interaksi masyarakat Banten, bukanlah KONSENSUS seperi yang ditawarkan fungsionalisme, namun lebih kepada KOMPETISI. *Kedua*, Ketidaksamaan structural karena di isi dengan unsure KKN di dalam pemerintahan banten. Ketidaksamaan dalam hal kuasa yang selalu di kendalikan oleh seorang gubernur jenderal (H. Tb. Hassan Sichab), di pemerintahan Banten. *Ketiga*, Individu dan kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan dan berjuang untuk mencapai tujuannya. *keempat*, Perubahan sosial secara menyeluruh di banten terutama pengembalian kembali akan

fungsi Jawara sebagai asset budaya masyarakat Banten.

Harper (1989) juga menjelaskan beberapa tipe-tipe gerakan sosial yang terdiri dari empat dimensi yaitu: (1) gerakan umum yang memiliki tujuan inklusif dan tersebar akan tetapi miskin akan artikulasi yang sentimentil, juga rumusannya terkadang samar dan gerakan spesifik yang cenderung memiliki tujuan, ideologi dan organisasi yang sempit dan fokus; (2) gerakan radikal yang mengusung perubahan fundamental dari sistem, bukan hanya perubahan dalam sistem dan gerakan reformis yang lebih menekankan perubahan dalam sistem yang sudah ada; (3) gerakan instrumental berusaha mendorong perubahan struktur dalam masyarakat dan gerakan ekspresif yang lebih menekankan perubahan pada karakter individual dan perilakunya; serta (4) gerakan sayap kiri yang lebih progresif dan utopian serta gerakan sayap kanan yang lebih konservatif. Selain keempat tipe tersebut, Wilson (1973) dalam Harper (1989) menjelaskan empat tipe kombinasi dari gerakan sosial yaitu gerakan reformatif, alternatif, transformatif, dan redemptif. Dapat juga dikatakan bahwa gerakan reformatif dan transformatif merupakan gerakan bersifat progresif atau utopi, sedangkan gerakan alternatif dan redemptif merupakan gerakan bersifat konservatif yang kontras.

Perbandingan Teori Dalam Analisis Perubahan Sosial di Banten

Perbandingan teori di dalam menganalisa peran jawara dalam perubahan sosial di masyarakat Banten serta kelebihan dan kelemahan masing-masing teori

Teori Struktural Fungsional	Teori Konflik
1. Karena di dalam teori struktural fungsional dalam menganalisa perubahan sosial yang ada di masyarakat banten prespektif peran jawara ini bahwa struktur kepemimpinan yang ada di Banten dapat mendefenisikan akan	1. Dengan menggunakan pisau analisis teori konflik untuk menghadapi pergulatan antar kelompok sosial yang di masyarakat Banten, bahwa gerakan sosial di banten sebagai representasi perubahan dari bawah ke atas yang merupakan gerakan yang muncul secara orisinil dari massa grass-roots dan direspon oleh elit. Perubahan juga dapat distimulasi dan dimanipulasi oleh elit untuk menciptakan solidaritas dan komitmen.

⁵ Ketika banten resmi lepas para tokoh sangat ngotot untuk menjadi pemimpin di banten, akan tetapi semuanya dapat di kalahkan oleh anaknya bapak H. Hasan Sihab, sehingga semua

kelompok yang merasa mendirikan banten berafiliasi untuk merebut hati masyarakat Banten.

kelas-kelas yang ada di Banten.	
2. dalam teori ini kelemahan yang sangat kentara guna menganalisisnya adalah tidak bisa memecahkan dalam permasalahan struktur kelas dan kurangnya akan mengkritisi akan perubahan atau terlalu konservatif dalam melihat struktur yang ada di banten.	2. pada teori konflik kelemahan dalam menganalisa peranan jawara banten ini adalah kurangnya akan tatanan yang lebih baik dalam melaksanakan sebuah pergerakan sosial yang dapat di terima pada masyarakat banten. Atau dalam artian terlalu revolusioner.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa adanya kedudukan, peran jawara menciptakan kultur tersendiri yang agak berbeda dengan kultur dominan masyarakat Banten, sehingga jawara tidak hanya menggambarkan suatu sosok tetapi juga telah menjadi kelompok yang memiliki nilai, norma dan pandangan hidup yang khas.

Jawara adalah seorang atau sekelompok yang memiliki kekuatan fisik dalam bersilat dan mempunyai ilmu-ilmu kesaktian (kadigjayaan), seperti kekebalan tubuh dari senjata tajam, bisa memukul dari jarak jauh dan sebagainya, sehingga bagi orang lain dapat membangkitkan rasa hormat dan takut, serta kagum dan benci. Karena kelebihanannya itu, ia dapat menjadi seorang tokoh yang kharismatik, terutama pada saat-saat kehidupan sosial mengalami krisis.

Sementara itu, peranan sosial jawara di dalam perpolitikan lokal banten karena tidak adanya akan control social yang baik di banten, maka jawara merambah pada peranannya ke level pemerintahan banten dan menduduki akan segala lini untuk mendapatkan kepentingan dan keuntungannya.

Hal tersebut harus di jegah dengan cara penguatan terhadap masyarakat akan pengetahuan dan kesadaran akan kepentingan KEBANTENAN berupa mengembalikan akan jawara pada asset budaya , dan nilai-

nilai akan kejawaraan memang harus di junjung tinggi bagi masyarakat banten. Sehingga perubahn social yang ada akan terasa baik di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Castles, Lance et.al. (1986). Birokrasi, Kepemimpinan, dan Perubahan Sosial di Indonesia. Surakarta: Penerbit HAPSARA. (Hal. 33-49).
- Carney, Michael. (2005). *The Co-Evolution of Institutional Environments and Organizational Strategie: The Rise of Family Business Groups in The Asean Region*. Concordia University
- Harper, Charles L. (1989). *Exploring Social Change*. New Jersey: Prentice Hall.
- Lauer, Robert H. (2003). *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tihami, (2003) *“Perilaku Politik Jawara Banten dalam Proses Politik di Banten”* UI perss
- Sztompka, Piotr (2005). Sosiologi Perubahan Sosial. Pustaka Media. Jakarta
- Weber, Max (2006) *Sosiologi*, Pustaka Pelajar.

Wertheim, WF (1999) *Gelombang
Pasang Emansipasi; Evolusi
dan Revolusi*, Garba Budaya &
ISAI

Internet
<http://compsoc.bandungfe.net/intro/part06.html>